



Analisis KR Tidak Takut Korupsi

Prof Dr Saratri Wilonoyudho



BARU dua belas hari turun dari jabatannya, seorang pejabat di Yogyakarta ditangkap KPK. Peristiwa ini makin menambah daftar panjang, bahwa sebagian para pejabat, tidak takut sama sekali untuk korupsi. Sangat licin dan kuatnya seorang koruptor diyakini sebagian orang sebagai kuatnya 'jamaah' di antara mereka. Koruptor kelas kakap tidak akan bertindak 'bodoh' untuk memakan harta jarahnya. Dengan membagi-bagi ke beberapa orang penting, tentu akan memperkuat 'pertahanannya'.

Korupsi, kata Migdal dalam *Strong, Societies, and Weak States* (1988) terjadi karena 'pucuk' koruptor senantiasa berusaha memperkecil kekuatan-kekuatan sentrifugal. Yang mungkin timbul dari luar atau dari dalam 'birokrasi' yang ia pimpin. Yang mungkin akan mengancam posisinya.

Caranya? Ia akan menyingkirkan orang-orang yang diperkirakan akan membahayakan kedudukannya. Dan membiarkannya sampai tingkat tertentu berbagai korupsi yang ada di bawahnya. Sambil ia minta 'setoran', baik berupa uang atau dukungan politis. Cara lain adalah mengangkat 'birokrat' di bawahnya dari 'kalangan sendiri'.

Karenanya, kunci utama untuk menyelamatkan Indonesia adalah hadirnya institusi penegak hukum yang adil dan tegas, serta tidak pandang bulu. Mereka harus berani menyikat koruptor dan pencuri uang negara yang mengakibatkan penderitaan bangsa ini yang tak pernah ada habisnya.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

Tidak

Sambungan hal 1

Karenanya orang juga mesti paham pelemahan KPK menjadi tema besar yang terus dilakukan oleh kekuatan-kekuatan korup. Pelemahan insitusi hukum membawa Indonesia seakan mengalami kegelapan. Dalam kegelapan, terjadi disorientasi manajemen pengelolaan negara. Hingga terjadi kekacauan penegakan hukum, hukum rimba, kacaunya sistem ekonomi yang berakibat memiskinkan rakyat, keputusan-keputusan yang tidak adil, dan seterusnya.

Kegelapan itu bersumber dari ditupinya nilai-nilai kebenaran, baik dari Tuhan (agama) juga nilai-nilai kebenaran kenegaraan seperti ruh UUD 45 dan Pancasila. Dalam kegelapan, pemimpin yang digadang-gadang karena memiliki intelektualitas, tidak bisa berbuat apa-apa karena kapasitas spiritual dan mentalnya rendah. Ia akan mudah disetir dan tidak bisa memanfaatkan kelebihanannya. Di lain

pihak, banyak pula kaum cendekiawan, ulama, ustadz, pemimpin agama, pemimpin sipituaal yang dahsyat, juga diam membisu seribu bahasa karena tidak memiliki intelektualitas atau ilmu ketatanegaraan yang mumpuni, atau tidak memiliki keberanian untuk berbuat.

Karenanya, menyikat koruptor harus menjadi agenda bersama bangsa ini. Sederhana saja karena miskinnya rakyat adalah karena korupsi. Saya membayangkan, negeri kaya raya, dan ini dapat dicapai tanpa harus (misalnya) menguasai teknologi. Syaratnya : asal sumberdaya alam dikelola dengan baik tidak dikorup. Lihat saja mana ada negeri di dunia ini yang memiliki kekayaan alam sebanyak negeri ini? Hitung saja di bumi pertiwi ini bertebaran aneka tambang, ada tambang emas, perak, tembaga, nikel, timah, uranium, minyak, dan seterusnya. Kekayaan hutan kita luar biasa, karena luas hutan kita

terbesar kedua di dunia. Di hutan bukan hanya ada kayu tapi juga ada plasma nutfah, tanaman obat, binatang langka yang bermanfaat dan lainnya.

Belum yang ada di lautan. Bukankah ikan yang dicuri dari perairan negeri ini saja senilai Rp 12 triliun setahun? Padahal pantai kita terpanjang di dunia. Selain ikan ada aneka kekayaan laut yang luar biasa banyaknya. Jika kekayaan alam dimanajemen dengan baik, penulis yakin negeri ini akan menjadi negeri terkaya di dunia, murah sandang pangan, rakyat sejahtera, sekolah dan berobat tidak mahal.

Ironis. Kekayaan alam tersebut dijarah orang serakah. Dan terjadi sejak kedatangan kolonial Belanda dan berlanjut hingga kini dengan IVOC-VOCi jenis baru. Baik dari bangsa sendiri maupun bangsa lain.

(Penulis adalah Guru Besar Ilmu Kependudukan Unnes, Semarang, peminat masalah-masalah sosial)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 April 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005